

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu migrasi internasional dan pencari suaka telah berkembang menjadi salah satu tantangan paling kompleks dalam tata kelola global kontemporer. Berdasarkan data United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR 2023), jumlah orang yang terpaksa mengungsi secara global telah melampaui 117.3 juta jiwa angka tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah modern.¹ Fenomena ini dipicu oleh konvergensi berbagai faktor struktural, termasuk konflik bersenjata yang berkepanjangan (seperti di Suriah, Yaman, dan Sudan), krisis politik dan hak asasi manusia (termasuk rezim otoriter di Afghanistan dan Eritrea), dampak perubahan iklim yang semakin nyata, serta kesenjangan ekonomi global yang terus melebar.² Dalam konteks ini, Inggris menginisiasi Migration and Economic Development Partnership (MEDP), atau dikenal sebagai Rwanda Asylum Plan, melalui perjanjian bilateral dengan Rwanda pada April 2022.

The Migration and Economic Development Partnership (MEDP), yang juga dikenal sebagai Rwanda Asylum Plan kebijakan ini dibentuk antara Inggris dan Rwanda pada bulan april tahun 2022 yang diumumkan oleh pemerintah Inggris dibawah kepemimpinan perdana menteri Boris Johnson.³ Kebijakan ini bertujuan untuk merelokasi pencari suaka yang tiba secara tidak sah di Inggris ke Rwanda

¹ UNHCR *Global Trends Report 2023*, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), accessed May 12, 2025, <https://www.unhcr.org/global-trends-report-2023>

²John Podesta, “The Climate Crisis, Migration, and Refugees,” *Brookings Blum Roundtable* (2019): 1–6, <https://www.brookings.edu/research/the-climate-crisis-migration-and-refugees/>

³ Rhys Drakeley, *Loophole or Law-Breaking? Rwanda Plan’s Inconsistency with International Refugee Law*, *York Law Review* vol. IV (Summer 2023): 142–143.

untuk memproses klaim suaka mereka.⁴ Meskipun telah disahkan melalui *Safety of Rwanda Bill* pada April 2024, kebijakan ini belum diimplementasikan secara masal hingga pembatalannya diumumkan pada Juli 2024.⁵

Rencana ini menghadapi berbagai tantangan hukum sejak awal. Pada Juni 2022, penerbangan pertama yang direncanakan dibatalkan karena intervensi dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Pada November 2023, Mahkamah Agung Inggris memutuskan bahwa rencana ini melanggar hukum karena risiko refoulement (pengembalian pengungsi ke tempat di mana mereka menghadapi bahaya) dan pelanggaran terhadap hukum hak asasi manusia Inggris dan internasional.⁶ Meskipun pemerintah Inggris menanggapi dengan meratifikasi perjanjian baru dengan Rwanda dan mengesahkan Undang-Undang Keamanan Rwanda (Asylum and Immigration) pada 25 April 2024, yang menyatakan Rwanda sebagai negara yang aman, rencana ini tetap tidak diimplementasikan.⁷ Pada Juli 2024, setelah Partai Labour memenangkan pemilihan umum, Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan pembatalan rencana ini, menggantikannya dengan inisiatif Badan Keamanan Perbatasan. Hanya empat orang yang pindah ke Rwanda melalui program relokasi sukarela terpisah, dan tidak ada pemindahan paksa yang terjadi.⁸

⁴ Rhys Drakeley, *Loophole or Law-Breaking? Rwanda Plan's Inconsistency with International Refugee Law*, *York Law Review* vol. IV (Summer 2023): 161

⁵ Anadolu Agency, “Brutal Manifestation of Western Imperialism’: Backlash in Rwanda over UK Asylum Seeker Deal,” di akses juni 6 , 2025, <https://www.aa.com.tr/en/africa/-brutal-manifestation-of-western-imperialism-backlash-in-rwanda-over-uk-asylum-seeker-deal/3202276>.

⁶ "Rwanda asylum partnership," The Law Society, diakses pada 20 juli, 2025, <https://www.lawsociety.org.uk/topics/immigration/rwanda-asylum-partnership>.

⁷ "Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: factsheet," GOV.UK, diakses pada 20 juli, 2025, <https://www.gov.uk/government/publications/the-safety-of-rwanda-asylum-and-immigration-bill-factsheets/safety-of-rwanda-asylum-and-immigration-bill-factsheet-accessible>.

⁸ Migration Observatory, "Q&A: The UK's former policy to send asylum seekers to Rwanda," Migration Observatory,diakses pada 20 juli, 2025, <https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/commentaries/qa-the-uks-policy-to-send-asylum-seekers-to-rwanda/>.

Rwanda Asylum Plan merupakan contoh nyata dari strategi eksternalisasi migrasi, di mana negara asal mengalihkan tanggung jawab pemrosesan suaka ke negara ketiga.⁹ Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR), yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Konvensi Pengungsi 1951 karena mengalihkan tanggung jawab internasional tanpa jaminan perlindungan yang memadai bagi pencari suaka.¹⁰ Perjanjian bilateral antara Inggris dan Rwanda mencakup pembayaran sebesar £120 juta kepada Rwanda sebagai bagian dari dana transformasi ekonomi.¹¹ Rwanda, sebagai negara penerima dana, memiliki motivasi ekonomi dan upaya untuk meningkatkan citra internasionalnya melalui kerja sama ini.¹²

Rwanda Asylum Plan, yang diumumkan pada April 2022, menimbulkan dampak signifikan yang memperkuat urgensi analisis neokolonialisme dalam tata kelola migrasi global. Secara hukum, kebijakan ini dikritik karena melanggar prinsip non-refoulement Konvensi Pengungsi 1951, sebagaimana ditegaskan oleh putusan Mahkamah Agung Inggris pada November 2023, yang menyoroti risiko pelanggaran HAM di Rwanda.¹³ Secara politik, rencana ini memicu polarisasi domestik di Inggris dan ketegangan diplomatik dengan badan internasional seperti

⁹ Samuel Parker and Josephine Cornell, “*The Asylum System is Completely Broken*”: An Analysis of Justifications and Resistance for the UK Government’s Rwanda Policy in Parliamentary Debates, *Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines* 16, no. 2 (2024): 2–3.

¹⁰ United Nations News, “UNHCR Deeply Concerned about UK-Rwanda Asylum Deal,” UN News, di akses juni 6, 2025, <https://news.un.org/en/story/2022/04/1116342>.

¹¹ Doug Faulkner and Joseph Lee, “UK Rwanda asylum plan against international law, says UN refugee agency,” BBC News, di akses juni 6, 2025, <https://www.bbc.com/news/uk-61122241>.

¹² Anadolu Agency, “‘Brutal Manifestation of Western Imperialism’: Backlash in Rwanda over UK Asylum Seeker Deal,” di akses juni 6, 2025, <https://www.aa.com.tr/en/africa/-brutal-manifestation-of-western-imperialism-backlash-in-rwanda-over-uk-asylum-seeker-deal/3202276>.

¹³ R (on the application of AAA and others) v Secretary of State for the Home Department [2023] UKSC 93, (judgment delivered December 20, 2023), diakses pada 3 Agustus 2025, <https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2023-0093>.

UNHCR, sementara Rwanda menghadapi risiko legitimasi karena mendukung kebijakan yang dianggap etis meragukan.¹⁴ Dari sisi ekonomi, dana £120 juta dari Inggris ke Rwanda menciptakan ketergantungan yang mencerminkan struktur neokolonial. Dampak kemanusiaan, seperti trauma psikologis pencari suaka akibat ancaman deportasi, serta ketimpangan geopolitik dalam tata kelola migrasi global, menegaskan perlunya mengkaji kebijakan ini sebagai praktik neokolonialisme yang memperkuat dominasi Global North atas Global South.

Terdapat ketimpangan struktural dalam pelaksanaan Rwanda Asylum Plan ini. Inggris sebagai bekas kekuatan kolonial, memanfaatkan posisinya yang dominan dalam sistem migrasi global dengan mengalihkan tanggung jawab pemrosesan pencari suaka ke negara Global Selatan seperti Rwanda. Kebijakan ini mencerminkan warisan kolonial yang berlanjut, di mana negara maju masih menentukan nasib negara-negara yang sebelumnya mereka dominasi secara politis maupun ekonomis.¹⁵ Inggris, sebagai bekas penjajah, memiliki posisi dominan dalam menentukan arah kebijakan migrasi. Rwanda, sebagai negara berkembang, berperan sebagai penerima kebijakan tanpa memiliki pengaruh signifikan dalam perumusan kebijakan tersebut.¹⁶ Hal ini mencerminkan relasi kuasa yang tidak seimbang antara negara Global North dan Global South dalam arsitektur kebijakan migrasi internasional.¹⁷

¹⁴ Dirk Kohnert, “One-Way Ticket to Rwanda? Boris Johnson’s Cruel Refugee Tactic Meets Kagame’s Shady Immigration Handling,” *SSRN Electronic Journal*, no. May (2022): 1–16

¹⁵ Dirk Kohnert, “One-Way Ticket to Rwanda? Boris Johnson’s Cruel Refugee Tactic Meets Kagame’s Shady Immigration Handling,” *SSRN Electronic Journal*, no. May (2022): 1–16.

¹⁶ Michael Collyer and Uttara Shahani, “Offshoring Refugees: Colonial Echoes of the UK-Rwanda Migration and Economic Development Partnership,” *Social Sciences* 12, no. 8 (2023): 12–13

¹⁷ Michael Collyer and Uttara Shahani, “Offshoring Refugees: Colonial Echoes of the UK-Rwanda Migration and Economic Development Partnership,” *Social Sciences* 12, no. 8 (2023): 13

Penelitian ini berfokus pada analisis Rwanda Asylum Plan sebagai praktik neokolonialisme, dengan mengeksplorasi bagaimana Inggris memanfaatkan keunggulan ekonominya untuk mengalihkan tanggung jawab migrasi ke Rwanda, sekaligus mempertahankan kepentingan politik domestiknya. Kerja sama ini mencerminkan relasi kuasa yang tidak seimbang antara Global North dan Global South, di mana Rwanda menjadi subjek ketergantungan ekonomi dan politik, khususnya dalam praktik eksternalisasi migrasi dan relasi antara negara-negara Global North dan Global South.¹⁸ Penataan ini tidak hanya memindahkan beban pemrosesan pengungsi ke Rwanda tetapi juga memperkuat ketidaksetaraan global, mengingatkan pada praktik kolonial historis di mana sumber daya dan tanggung jawab diekstraksi dari koloni untuk kepentingan pusat kekuasaan imperial.¹⁹ Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam memahami implikasi kebijakan migrasi terhadap hubungan internasional dan struktur kekuasaan global.

1.2 Rumusan Masalah

Kerja sama bilateral antara Inggris dan Rwanda dalam Rwanda Asylum Plan mencerminkan strategi eksternalisasi migrasi yang merupakan kebijakan negara biasanya negara maju yang memindahkan proses pengelolaan, kontrol, dan bahkan pencegahan migrasi ke luar wilayah yurisdiksi mereka, terutama ke negara-

¹⁸ Heaven Crawley and Dimitris Skleparis, “*Refugees, Migrants, Neither, Both: Categorical Fetishism and the Politics of Bounding in Europe’s ‘Migration Crisis’*,” *Journal of Ethnic and Migration Studies* (2017): 13–14

¹⁹ Parvati Nair, “How the UK’s plan to send asylum seekers to Rwanda is 21st-century imperialism writ large,” The Conversation, diakses pada 20 juli, 2025, <https://theconversation.com/how-the-uks-plan-to-send-asylum-seekers-to-rwanda-is-21st-century-imperialism-writ-large-181501>.

negara berkembang. Seperti yang terjadi pada Rwanda Asylum Plan yang mengalihkan tanggung jawab pemrosesan pencari suaka dari negara Global North ke negara Global South. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana Inggris memanfaatkan posisi dominannya dalam struktur kekuasaan global untuk membentuk relasi yang timpang dengan Rwanda, yang berperan sebagai penerima kebijakan dengan ketergantungan ekonomi dan politik. Dalam konteks ini, praktik neokolonialisme terlihat dari mekanisme kontrol tidak langsung, seperti insentif finansial dan pengaruh kebijakan, yang mempertahankan ketimpangan struktural antara kedua negara. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana Rwanda Asylum Plan mereproduksi dinamika neokolonialisme melalui relasi kuasa yang asimetris, dengan fokus pada mekanisme ekonomi, politik, dan hukum yang membentuk kerja sama tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti berikan, untuk pertanyaan penelitian yang ingin peneliti gunakan yaitu Bagaimana Rwanda Asylum Plan mempresentasikan neokolonialisme dalam pengaturan migrasi global?

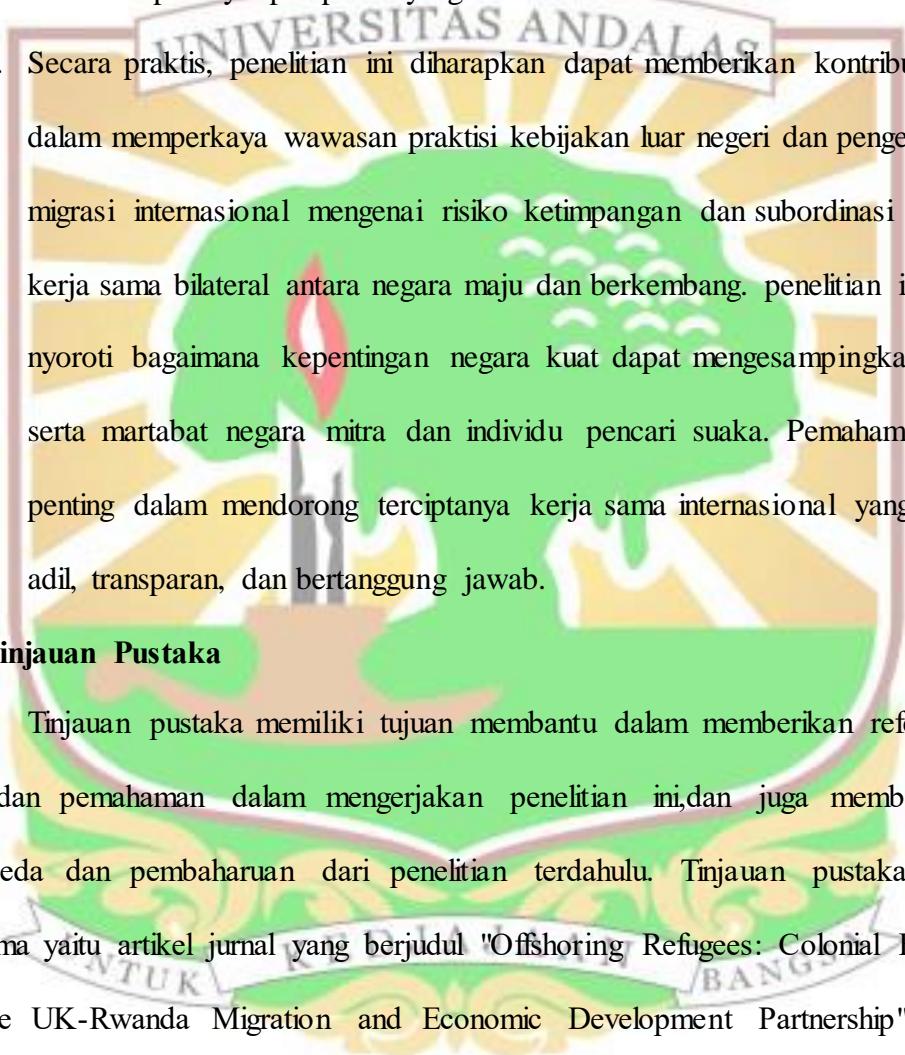
1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika neokolonialisme yang tereproduksi melalui kebijakan migrasi internasional, khususnya melalui kasus Rwanda Asylum Plan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa menambah literatur tentang hubungan internasional, kebijakan migrasi, dan

neo colonialism, yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa atau terkait. Serta penelitian ini dapat membuka ruang diskusi antara berbagai disiplin ilmu, seperti hubungan internasional, studi nekolonialisme, studi migrasi, dan ilmu politik, serta memperkaya perspektif yang ada.

- 
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusinya dalam memperkaya wawasan praktisi kebijakan luar negeri dan pengelolaan migrasi internasional mengenai risiko ketimpangan dan subordinasi dalam kerja sama bilateral antara negara maju dan berkembang. penelitian ini menyoroti bagaimana kepentingan negara kuat dapat mengesampingkan hak serta martabat negara mitra dan individu pencari suaka. Pemahaman ini penting dalam mendorong terciptanya kerja sama internasional yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab.

1.6 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki tujuan membantu dalam memberikan referensi, ide, dan pemahaman dalam mengerjakan penelitian ini, dan juga memberikan pembeda dan pembaharuan dari penelitian terdahulu. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu artikel jurnal yang berjudul "Offshoring Refugees: Colonial Echoes of the UK-Rwanda Migration and Economic Development Partnership" oleh Michael Collyer dan Uttara Shahani.²⁰ Artikel jurnal ini membahas kritik historis dan politis terhadap perjanjian deportasi suaka antara Inggris dan Rwanda, yang dikenal sebagai UK-Rwanda Migration and Economic Development Partnership (MEDP). Penulis menelusuri asal-usul kolonial dari praktik pemindahan paksa

²⁰ Michael Collyer and Uttara Shahani, "Offshoring Refugees: Colonial Echoes of the UK-Rwanda Migration and Economic Development Partnership," *Social Sciences* 12, no. 8 (August 1, 2023).

terhadap para pengungsi dan menunjukkan bahwa kebijakan ini merupakan kelanjutan dari tradisi kolonialisme Inggris dalam mengatur mobilitas manusia secara koersif. Dengan membandingkan praktik masa kini dengan sejarah relokasi dalam kekaisaran Inggris, artikel ini mengungkap bagaimana kebijakan migrasi modern, seperti Migration and Economic Development Partnership (MEDP), memperkuat relasi kekuasaan yang bersifat hierarkis dan berakar kolonial.

Para penulis berpendapat bahwa rencana pemindahan paksa pencari suaka dari Inggris ke Rwanda tidak hanya menyimpang dari norma hukum internasional dan hak asasi manusia kontemporer, tetapi juga menghidupkan kembali pola-pola kolonial yang menormalisasi pengasingan dan pemindahan paksa populasi “tidak diinginkan” ke lokasi di luar negeri. Artikel jurnal ini sangat kuat dalam membangun koneksi historis antara kolonialisme dan kebijakan migrasi saat ini, penulis cenderung menekankan dimensi simbolik dan historis lebih daripada dimensi struktural ekonomi global yang menopang kebijakan seperti Migration and Economic Development Partnership (MEDP). Artikel jurnal ini kurang mengelaborasi dimensi ekonomi-politik dari neokolonialisme kontemporer yang tidak hanya simbolik, tetapi juga struktural dan transnasional.

Artikel jurnal ini berkontribusi dalam memberikan penjelasan tentang tentang neokolonialisme karena penulis menempatkan Migration and Economic Development Partnership (MEDP) secara langsung dalam tradisi panjang kolonialisme Inggris. Argumen utama bahwa deportasi suaka ke Rwanda mencerminkan praktik relokasi paksa yang pernah dijalankan di era kolonial memperkuat kerangka konseptual neokolonialisme dalam kebijakan migrasi. Artikel jurnal ini memberikan peneliti pondasi teoritis yang kuat untuk menyatakan

bahwa Migration and Economic Development Partnership (MEDP) bukan hanya bentuk outsourcing kebijakan suaka, tetapi manifestasi neokolonialisme kontemporer.

Kedua yaitu artikel jurnal yang “One-way ticket to Rwanda? Boris Johnson's cruel refugee tactic meets Kagame's shady immigration handling” oleh Dirk Kohnert.²¹ Artikel jurnal ini mengkritisi secara tajam kebijakan Rwanda Asylum Plan yang digagas oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Boris Johnson dan bekerja sama dengan Presiden Rwanda, Paul Kagame. Dalam kebijakan ini, pencari suaka yang tiba secara ilegal di Inggris akan dideportasi ke Rwanda untuk diproses dan menetap di sana. Dirk Kohnert menyoroti dimensi politik populis, latar belakang postkolonial, dan praktik-praktik diskriminatif yang tersembunyi di balik retorika “pengendalian migrasi”.

Penulis menunjukkan bahwa kebijakan deportasi ini dibangun di atas motivasi populisme sayap kanan dan strategi politis Boris Johnson untuk menarik dukungan elektoral melalui isu imigrasi. Di sisi lain, Rwanda yang dipimpin oleh Kagame dengan catatan HAM yang buruk diuntungkan secara ekonomi melalui transfer dana dari Inggris, meskipun terbukti tidak mampu menangani kebutuhan pengungsi yang sudah ada. Artikel jurnal ini juga menegaskan bahwa pemilihan perlakuan terhadap pengungsi dari Ukraina dan Afrika mencerminkan rasisme terselubung dalam kebijakan migrasi Inggris.

Artikel jurnal ini lebih bersifat deskriptif dan opini kritis ketimbang studi empiris yang terstruktur secara metodologis. Tidak terdapat analisis mendalam mengenai kerangka kerja sama resmi antara Inggris dan Rwanda dalam dokumen

²¹ Dirk Kohnert, “One-Way Ticket to Rwanda? Boris Johnson's Cruel Refugee Tactic Meets Kagame's Shady Immigration Handling,” *SSRN Electronic Journal*, no. May (2022): 1–16.

hukum, struktur institusional pelaksana, atau respon institusi internasional secara sistematis. Selain itu, artikel jurnal ini belum mengembangkan secara eksplisit kategori analitis untuk memahami relasi neokolonial dalam dimensi hukum internasional atau pembangunan institusional. Oleh karena itu, peneliti akan mengisi gap tersebut dengan pendekatan konseptual yang lebih sistematis melalui lensa neokolonialisme dan menganalisis secara lebih konkret struktur kerja sama serta ketimpangan aktor negara dalam kebijakan ini.

Artikel jurnal ini memberikan kontribusi penting pada penelitian peneliti dengan mengaitkan Rwanda Asylum Plan dengan warisan kolonialisme, politik identitas, dan praktik eksklusi global. penulis memperkuat dasar teoritis peneliti untuk melihat kebijakan ini sebagai bentuk neokolonialisme, di mana negara kuat seperti Inggris memanfaatkan negara berkembang seperti Rwanda sebagai alat pengendalian migrasi, alih-alih menyelesaikan akar permasalahan.

Ketiga yaitu artikel jurnal yang berjudul "Attenuated Governance in Australia's Offshore Immigration Detention Regime: How Financial Mismanagement Can Achieve Government Goals" oleh Tamara Tubakovic dan Amy Nethery.²²

Artikel jurnal ini membahas praktik pengelolaan migrasi Australia melalui kebijakan offshore detention (penahanan di luar wilayah) terhadap pencari suaka, terutama di Nauru dan Papua Nugini. Melalui konsep *attenuated governance*, penulis menunjukkan bagaimana pemerintah Australia menggunakan pengeluaran finansial yang sangat besar bukan sebagai bentuk disfungsi, tetapi sebagai strategi

²² Tamara Tubakovic and Amy Nethery, "Attenuated Governance in Australia's Offshore Immigration Detention Regime: How Financial Mismanagement Can Achieve Government Goals," *Journal of Immigrant and Refugee Studies* 23, no. 1 (2025): 121–134, <https://doi.org/10.1080/15562948.2024.2382475>.

sadar untuk menghindari akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang terjadi di fasilitas penahanan tersebut.

Penulis menemukan bahwa *attenuated governance* terjadi melalui dua mekanisme utama: *attenuated delivery* dan *rhetorical attenuation*. Yang pertama mencakup penggunaan kontrak privat dan insentif finansial kepada negara tuan rumah sebagai cara menjauhkan tanggung jawab negara atas pelanggaran yang terjadi. Yang kedua, yakni retorika yang mengaburkan peran pemerintah, memungkinkan Australia menyangkal tanggung jawab atas kekerasan, pengabaian, dan kematian yang terjadi di pusat penahanan. Melalui strategi ini, Australia mampu mempertahankan kebijakan yang secara internasional dikritik sebagai tidak manusiawi tanpa menanggung beban politik atau hukum yang signifikan. Praktik ini diperkuat oleh fakta bahwa kontrak-kontrak tersebut sering kali dibuat tanpa pengawasan publik atau akuntabilitas fiskal yang memadai.

Kekurangan utama dari artikel jurnal ini terletak pada keterbatasan cakupan komparatifnya. Meskipun penulis menyebut bahwa Australia telah menjadi model bagi negara-negara seperti Inggris dan Denmark, pembahasan terhadap kasus Rwanda Asylum Plan atau praktik serupa di negara Global North lainnya masih sangat terbatas. Hal ini menjadi celah penting yang dapat diisi oleh peneliti, yakni dengan membandingkan bagaimana logika dan struktur *attenuated governance* beroperasi dalam konteks kerja sama Inggris-Rwanda. Selain itu, meskipun artikel jurnal ini sangat kuat dalam menjelaskan dimensi keuangan dan tata kelola, penulis belum banyak mengeksplorasi dinamika kekuasaan neokolonialisme secara eksplisit, yang menjadi kerangka utama dalam penelitian yang akan diteliti peneliti.

Artikel jurnal ini memberikan kontribusi penting bagi peneliti tentang praktik neokolonialisme dalam Rwanda Asylum Plan antara Inggris dan Rwanda. Konsep attenuated governance dapat diaplikasikan secara relevan untuk menjelaskan bagaimana negara Global North (seperti Inggris) mendesain kebijakan eksternalisasi suaka yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan kontrol migrasi sembari menghindari tanggung jawab langsung atas dampak kebijakan tersebut. Dalam konteks Rwanda Asylum Plan, strategi serupa tampak melalui pemindahan kewajiban hukum dan etis ke Rwanda, sebuah negara Global South, dengan imbalan bantuan finansial yang besar. Dengan demikian, artikel jurnal ini memperkuat argumen peneliti bahwa kebijakan eksternalisasi tidak hanya berakar pada kepentingan politik migrasi, tetapi juga beroperasi dalam logika neokolonial di mana negara-negara Global South dimanfaatkan sebagai “ruang outsourcing” untuk kebijakan represif.

Keempat yaitu artikel jurnal yang berjudul "Refugeehood in Crisis and the Quest for a Decolonial Turn in Africa" oleh Norman Pinduka.²³ Artikel jurnal ini menyajikan kritik terhadap sistem perlindungan pengungsi di Afrika yang selama ini tunduk pada kerangka berpikir dan institusi Eurocentrik. Penulis menyoroti bahwa sistem suaka yang beroperasi saat ini tidak sesuai dengan nilai-nilai dan sejarah kehidupan masyarakat Afrika. Ia menegaskan bahwa konsep dan kebijakan tentang pengungsi termasuk definisi, mekanisme integrasi, hingga kebijakan encampment merupakan warisan kolonial yang telah menggantikan praktik-praktik penerimaan dan kohabitation khas Afrika sebelum kolonialisme.

²³ Norman Pinduka, “Refugeehood in Crisis and the Quest for a Decolonial Turn in Africa,” *Pan-African Conversations* 1, no. 2 (2023): 112–130.

Penulis menemukan bahwa sistem pengungsi di Afrika merupakan manifestasi kolonialitas yang telah mengasingkan para pengungsi dari kemanusiaan mereka sendiri, melalui praktik “ordering, othering, and hierarchising” yang bersumber dari epistemologi Barat. Penampungan di kamp, proses integrasi yang didikte oleh negara, dan hierarki antara warga lokal dan pengungsi menegaskan keberlanjutan relasi kekuasaan kolonial dalam bentuk baru. Selain itu, sistem ini mengabaikan praktik-praktik lokal pra-kolonial yang lebih inklusif dan fleksibel dalam menerima pendatang.

Artikel jurnal ini memiliki kekurangan yaitu minimnya fokus pada studi kasus konkret, seperti Rwanda Asylum Plan. Padahal, penggunaan studi empiris kontemporer seperti kasus kerja sama Inggris Rwanda akan memperkuat klaim dekolonialitas yang disampaikan. Selain itu, meskipun penulis mengusulkan pembentukan rezim pengungsi yang berbasis Afrika, penyebutan tentang bentuk institusional dan mekanisme praktis dari sistem alternatif ini masih bersifat normatif dan idealistik, sehingga kurang operasional untuk dijadikan rekomendasi kebijakan konkret. Artikel jurnal ini sangat relevan untuk mendukung analisis peneliti mengenai Rwanda Asylum Plan sebagai bentuk neokolonialisme oleh Inggris terhadap Rwanda. Kritik penulis terhadap sistem pengungsi yang berakar pada Eurocentrisme membantu menjelaskan bagaimana kerangka hukum internasional yang dibentuk oleh Barat tidak netral secara nilai, tetapi merupakan perpanjangan dari dominasi kolonial. Dalam konteks Rwanda Asylum Plan, di mana Inggris memindahkan tanggung jawab suaka ke negara bekas jajahan, artikel jurnal ini memperkuat argumen bahwa tindakan tersebut bukanlah kerja sama setara, melainkan reproduksi kolonialitas kekuasaan dalam bentuk baru. Jurnal ini juga memperkuat

penggunaan perspektif dekolonial dalam menjelaskan subordinasi struktural Rwanda sebagai negara penerima.

Kelima yaitu artikel jurnal yang berjudul "Refugees, forced migration, and conflict: Introduction to the special issue" oleh Alex Braithwaite, Idean Salehyan, & Burcu Savun.²⁴ Artikel jurnal ini membahas mengulas fenomena migrasi paksa global, menyoroti rekor jumlah orang yang mengungsi (lebih dari 68,5 juta pada akhir 2017) pasca-Perang Dunia II karena konflik, penganiayaan, kelaparan, atau bencana alam. Jurnal ini melacak evolusi rezim pengungsi internasional, dari pembentukannya pasca-Perang Dunia II dengan fokus awal pada Eropa, hingga pergeseran perhatian ke negara-negara yang baru merdeka selama Perang Dingin. Penulis mencatat adanya pergeseran pasca-9/11 di mana pengungsi, terutama dari negara-negara Muslim, dipandang dengan kecurigaan, yang berkontribusi pada kebangkitan populisme dan pembatasan imigrasi di negara-negara Barat. Artikel jurnal ini menunjukkan bahwa migrasi paksa bukanlah sekadar fenomena kemanusiaan, tetapi juga memiliki dimensi geopolitik dan keamanan yang signifikan. Selain itu, artikel ini juga menyoroti pentingnya opini publik dan bagaimana pengalaman pribadi warga negara tuan rumah dapat membentuk sikap terhadap pengungsi, sekaligus memperkenalkan dataset POSVAR yang mengisi kesenjangan data terkait kekerasan terhadap atau oleh pengungsi.

Artikel jurnal ini kurang membahas mengenai relasi kekuasaan antara negara-negara asal dan negara penerima dalam konteks perjanjian migrasi, khususnya dalam kerangka neokolonialisme. Meskipun artikel jurnal ini memberikan

²⁴ Alex Braithwaite, Idean Salehyan, and Burcu Savun, "Refugees, Forced Migration, and Conflict: Introduction to the Special Issue," *Journal of Peace Research* 56, no. 1 (2019): 5–11.

analisis menyeluruh terhadap dinamika migrasi paksa dan dampaknya, tidak terdapat eksplorasi kritis mengenai bagaimana negara-negara Barat menggunakan kebijakan pengungsi sebagai alat politik untuk mempertahankan dominasi global. Aspek seperti transaksi politik antara negara Global North dan Global South, yang menjadi inti dalam Rwanda Asylum Plan, tidak disentuh secara eksplisit. Oleh karena itu, pendekatan neokolonialisme yang digunakan oleh peneliti bisa mengisi gap pada artikel jurnal ini.

Artikel jurnal ini berkontribusi dalam memberikan landasan konseptual yang kuat bagi penelitian yang akan diteliti peneliti tentang praktik neokolonialisme dalam Rwanda Asylum Plan. Meskipun tidak secara langsung membahas kebijakan eksternalisasi migran oleh Inggris, artikel jurnal ini memperkuat argumen bahwa kebijakan pengelolaan pengungsi selalu berada dalam lanskap politik global yang timpang dan rentan disalahgunakan oleh negara-negara kuat. Dalam konteks Rwanda Asylum Plan, temuan dalam artikel ini memperjelas bagaimana negara-negara maju sering menggunakan narasi keamanan dan ketertiban sosial untuk menjustifikasi pengalihan tanggung jawab migrasi ke negara-negara berkembang.

Keenam yaitu artikel jurnal yang berjudul "what happens when the united states stops taking in refugees?" oleh Molly Fee dan Rawan Arar.²⁵ Artikel jurnal ini membahas dampak dari kebijakan pemerintahan Donald Trump yang secara drastis mengurangi jumlah pengungsi yang diizinkan masuk ke Amerika Serikat, khususnya melalui *Executive Order* tahun 2017 yang dikenal sebagai "Muslim Ban". Penulis menyoroti bagaimana perubahan kebijakan ini tidak hanya memengaruhi sistem domestik penerimaan pengungsi di AS, tetapi juga merusak struktur

²⁵ Molly Fee and Rawan Arar, "What Happens When the United States Stops Taking in Refugees?," *Contexts* 18, no. 2 (2019): 18–23.

bantuan pengungsi global yang selama ini dijalankan oleh kerja sama antara negara-negara donor di Global North dan negara-negara penerima pengungsi di Global South.

Temuan utama dari artikel jurnal ini adalah bahwa pemotongan kuota resettlement oleh Amerika Serikat telah menciptakan efek domino yang mengganggu kestabilan sistem bantuan pengungsi global. Tidak hanya pengungsi yang terdampak secara langsung karena tertundanya proses pemindahan ke negara tujuan, tetapi juga komunitas tuan rumah di Global South seperti di Kenya dan Yordania yang mengalami kerugian ekonomi akibat pengurangan lapangan kerja di sektor resettlement. Selain itu, di tingkat domestik, penurunan tajam jumlah pengungsi menyebabkan krisis pendanaan dan penutupan berbagai lembaga resettlement di Amerika Serikat, yang sebelumnya berfungsi sebagai tulang punggung integrasi pengungsi dalam masyarakat. Kebijakan ini menambah beban negara-negara berkembang dan memperpanjang kondisi pengungsian yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Artikel jurnal ini berfokus pada konteks Amerika Serikat dan dampaknya terhadap sistem resettlement global, tanpa menyoroti secara mendalam bagaimana negara-negara Global South merespons atau menegosiasikan posisi mereka dalam sistem ini. Dalam konteks penelitian yang akan diteliti peneliti, hal ini menjadi celah penting karena kerja sama Rwanda-Inggris dalam Rwanda Asylum Plan justru melibatkan negosiasi aktif dari negara Global South (Rwanda) yang tidak hanya pasif menerima beban, tetapi juga menjadikan kerja sama ini sebagai alat diplomasi dan ekonomi. Artikel jurnal ini juga tidak membahas secara eksplisit dimensi

postkolonial atau neokolonial dalam kebijakan migrasi, sehingga kurang memberikan kerangka analitis yang sesuai untuk membedah relasi kuasa dalam kerja sama lintas kawasan antara negara maju dan negara berkembang.

Artikel jurnal ini berkontribusi penting dalam memberikan konteks global terhadap praktik eksternalisasi tanggung jawab pengungsi yang dilakukan negara-negara Global North, termasuk Inggris dalam Rwanda Asylum Plan. Penulis menunjukkan bahwa pembatasan resettlement bukan hanya keputusan kebijakan domestik, tetapi juga cerminan dari distribusi tanggung jawab yang timpang dalam sistem internasional. Dalam konteks penelitian yang akan diteliti peneliti, temuan ini dapat digunakan untuk memperkuat argumen bahwa Rwanda Asylum Plan merupakan lanjutan dari pola yang sama yakni negara maju menghindari tanggung jawab atas pengungsi dengan mengalihkan beban tersebut ke negara berkembang, dalam relasi yang mengandung karakter neokolonial.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan untuk menjadi tinjauan pustaka peneliti, menunjukkan bahwa Rwanda Asylum Plan merepresentasikan strategi eksternalisasi migrasi yang menunjukkan jejak kolonialisme, baik dalam dimensi simbolik, kultural, maupun administratif. Collyer dan Shahani menekankan kesinambungan sejarah kolonial Inggris dalam praktik pemindahan paksa, kohnert Mengkritik terhadap Rwanda Asylum Plan sebagai bentuk eksternalisasi migrasi yang bermuatan rasisme institusional, kalkulasi politik populis, dan warisan kolonialisme dalam kebijakan migrasi Inggris pasca-Brexit., Tubakovic dan Nethery Menjelaskan bagaimana pemerintah Australia menggunakan mekanisme keuangan dan outsourcing untuk menghindari akuntabilitas atas pelanggaran HAM terhadap pencari suaka, Pinduka mengkritisi dominasi sistem pengungsi Eurocentrik yang

mencerminkan keberlanjutan kolonialitas kekuasaan di Afrika, Braithwaite et al serta Fee dan Arar memperlihatkan bagaimana kebijakan migrasi dipengaruhi oleh kalkulasi geopolitik negara maju, namun belum mengelaborasi dimensi neokolonial secara eksplisit.

Dari temuan tersebut, tampak bahwa studi-studi terdahulu belum secara komprehensif menggabungkan dimensi ekonomi-politik, simbolik, hukum, dan struktural dari Rwanda Asylum Plan dalam satu analisis yang berfokus pada praktik neokolonialisme secara utuh dan relasional. Oleh karena itu, penelitian ini diteliti untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis Rwanda Asylum Plan menggunakan kerangka neokolonialisme guna menunjukkan bagaimana kebijakan tersebut tidak hanya melanjutkan warisan kolonial, tetapi juga mereproduksi relasi kuasa global yang timpang melalui mekanisme ekonomi, politik, hukum, dan diskursif antara Inggris sebagai aktor Global North dan Rwanda sebagai negara Global South yang dikonstruksi dalam posisi subordinat.

1.7 Kerangka Konseptual

Konsep pada sebuah penelitian digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian dan menjawab pertanyaan dalam penelitian. Maka dari itu, Dalam menganalisis praktik neokolonialisme dalam kerja sama Rwanda Asylum Plan antara Inggris dan Rwanda peneliti menggunakan neocolonialism sebagai konsep untuk kerangka konseptual. Neokolonialisme mengacu pada bentuk dominasi tidak langsung oleh kekuatan asing terhadap negara-negara berkembang, terutama di Afrika, setelah era kolonialisme formal berakhir. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Kwame Nkrumah, yang mendefinisikannya sebagai "tahap terakhir imperialism" di mana kekuatan ekonomi, politik, dan militer dari negara-negara

maju digunakan untuk mempertahankan pengaruh atas negara-negara yang baru merdeka tanpa pendudukan fisik langsung. Negara-negara di Global South seperti Rwanda tetap dianggap berdaulat secara yuridis, tetapi dalam praktiknya kedaulatan mereka dikompromikan oleh ketergantungan terhadap negara-negara donor seperti Inggris. Dalam konteks ini, Nkrumah menyatakan bahwa "dalam teori, negara itu independen dan memiliki semua atribut luar dari kedaulatan internasional. Tetapi kenyataannya, sistem ekonominya dan dengan demikian kebijakan politiknya diarahkan dari luar"²⁶ Dalam buku *Emerging Powers and Neo-Colonialism in Africa, Neo-Colonialism and the Poverty of "Development" in Africa* Langan menyebutkan terdapat beberapa elemen kunci neokolonialisme yang diambil dari permikiran Kwame Nkrumah sebagai berikut:

a. Kedaulatan Hampa (Nominal Sovereignty)

Nkrumah menyebutkan "Hakikat neokolonialisme adalah bahwa negara yang menjadi sasarannya, secara teori, bersifat merdeka dan memiliki segala simbol-simbol lahiriah kedaulatan internasional. Namun dalam kenyataannya, sistem ekonominya dan dengan demikian kebijakan politiknya dikendalikan dari luar".²⁷ merujuk pada kondisi di mana negara-negara Afrika memiliki simbol-simbol eksternal otonomi seperti bendera, lagu kebangsaan, dan keanggotaan dalam badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa namun kekurangan kendali substantif atas trajektori ekonomi dan politik mereka.

²⁶ Mark Langan, *Emerging Powers and Neo-Colonialism in Africa, Neo-Colonialism and the Poverty of "Development" in Africa*, 2018.,5.

²⁷ Mark Langan, *Emerging Powers and Neo-Colonialism in Africa, Neo-Colonialism and the Poverty of "Development" in Africa*, 2018.,5.

Hal ini terjadi melalui orkestrasi struktur ekonomi yang mengikat negara-negara Afrika pada kepentingan eksternal, seperti perjanjian perdagangan yang tidak setara, beban utang, dan bantuan bersyarat yang mendikte prioritas kebijakan. Misalnya, kekuatan eksternal memanfaatkan dominasi mereka dalam keuangan dan perdagangan global untuk memastikan bahwa ekonomi Afrika tetap berorientasi pada ekspor bahan mentah, sehingga menghambat industrialisasi dan penambahan nilai.

Sebuah contoh diberikan dalam konteks negara-negara Afrika pasca-kemerdekaan, di mana kedaulatan hukum (misalnya, pengakuan PBB) menyembunyikan ketiadaan kedaulatan empiris, seperti yang terlihat di sektor minyak Ghana di mana dikte asing merusak kendali nasional atas sumber daya.²⁸ Di sini, kedaulatan nominal memungkinkan aktor eksternal memengaruhi hasil tanpa aneksasi formal, yang menyebabkan kemajuan ekonomi yang tertunda dan kemiskinan yang mengakar.

b. Pengaruh Eksternal terhadap Kebijakan Domestik

Nkrumah juga menyebutkan "Kebijakan tersebut lebih berorientasi pada kepentingan material unsur-unsur asing ketimbang kebutuhan warga setempat".²⁹ Dalam hal ini menjelaskan bahwa Kekuatan eksternal seperti entitas asing donor, korporasi, atau pemerintah membentuk pengambilan keputusan internal agar selaras dengan tujuan strategis

²⁸Mark Langan, Emerging Powers and Neo-Colonialism in Africa, Neo-Colonialism and the Poverty of "Development" in Africa, 2018,55.

²⁹ Mark Langan, Emerging Powers and Neo-Colonialism in Africa, Neo-Colonialism and the Poverty of "Development" in Africa, 2018,5.

mereka. Elemen ini terwujud karena kekuatan eksternal bertujuan melindungi kepentingan geopolitik dan ekonomi mereka di Afrika, seperti akses terhadap mineral, pasar, atau pengendalian migrasi, dalam era pasca-kolonial di mana intervensi langsung secara politik tidak dapat diterima.

Mekanismenya melibatkan kondisionalitas bantuan, tekanan diplomatis, dan pembingkaihan diskursif yang menggambarkan resep eksternal sebagai 'praktik terbaik' untuk pembangunan. Misalnya, donor mungkin menahan dana kecuali pemerintah penerima mengadopsi reformasi liberalisasi, sehingga secara efektif mendikte kebijakan fiskal, perdagangan, dan sosial. Yang mana terjadi pada negara Angola, pengaruh Cina terhadap kebijakan domestik melalui bantuan dan investasi minyak membuat pemerintahan Dos Santos lebih memprioritaskan kepentingan Cina daripada kesejahteraan rakyat, yang menunjukkan bagaimana pengaruh eksternal ini memperburuk kemiskinan melalui korupsi dan ketidakefisienan.³⁰

c. Kooptasi Elite Lokal

"Elit-elit Afrika yang terlibat dalam hubungan neokolonialisme akan memerintah atas nama pihak asing yang mendukung mereka, dan pada dasarnya 'mengesampingkan' kepentingan ekonomi rakyatnya sendiri".

³⁰ Mark Langan, Emerging Powers and Neo-Colonialism in Africa, Neo-Colonialism and the Poverty of "Development" in Africa, 2018.109-110.

³¹ Mark Langan, Emerging Powers and Neo-Colonialism in Africa, Neo-Colonialism and the Poverty of "Development" in Africa, 2018.,6.

Dalam hal ini menggambarkan proses di mana kekuatan eksternal merekrut atau memengaruhi pemimpin Afrika untuk mendukung agenda asing, sering kali melalui insentif pribadi seperti bantuan, investasi, atau dukungan politik. Ini menciptakan "puppet elites" yang tampan nasionalis tetapi sebenarnya melayani kepentingan eksternal, sehingga memperlemah legitimasi pemerintahan dan menghalangi reformasi pro-rakyat.

Elemen ini terjadi karena kerentanan elite Afrika terhadap insentif eksternal, yang berakar pada ketidakstabilan ekonomi pasca-kolonial dan kebutuhan akan modal asing. Alasan utamanya adalah untuk memastikan kestabilan akses terhadap sumber daya Afrika tanpa risiko perlawanan nasionalis, sehingga elite lokal menjadi agen neo-kolonial yang memperpanjang ketergantungan. Cara pelaksanaannya melibatkan pemberian bantuan terkait (tied aid), kontrak bisnis yang menguntungkan, atau dukungan diplomatik, yang membuat elite bergantung pada patron asing. Seperti kooptasi elite di Zambia oleh perusahaan Cina seperti China Nonferrous Mining Co. Group (CNMC), di mana elite politik menerima manfaat pribadi untuk mengabaikan pelanggaran hak pekerja, sehingga memperburuk kemiskinan pekerja tambang.³²

d. Bantuan sebagai Kredit Berputar (Revolving Credit)

³² Mark Langan, Emerging Powers and Neo-Colonialism in Africa, Neo-Colonialism and the Poverty of "Development" in Africa, 2018, 112.

"Bantuan untuk negara neokolonial hanyalah kredit berputar: dibayarkan oleh penguasa neokolonial, mengalir melalui negara neokolonial, lalu kembali dalam bentuk laba yang bertambah".³³ merujuk pada praktik di mana bantuan donor dikembalikan ke negara pemberi melalui kontrak barang, jasa, atau investasi, sehingga bukan merupakan bantuan sejati melainkan investasi yang menguntungkan donor. Ini memperkuat siklus ketergantungan, di mana Afrika membayar kembali bantuan melalui ekspor murah atau kontrak yang tidak adil.

Hal ini muncul karena motif egois donor untuk mendukung ekonomi domestik mereka sendiri, yang berakar pada imperialisme ekonomi. Alasan utamanya adalah untuk merebut kembali nilai bantuan melalui perdagangan dan investasi, sehingga memperpanjang kemiskinan Afrika dengan mencegah akumulasi modal lokal. Cara terjadinya adalah melalui bantuan terkait yang mengharuskan penggunaan kontraktor atau barang dari donor, menciptakan siklus di mana bantuan "berputar" kembali ke Utara.

Dalam hal ini terjadi di Afrika-Uni Eropa Infrastructure Trust Fund (EU-AITF), bantuan berfungsi sebagai subsidi untuk investor Eropa, yang dikritik sebagai revolving credit yang memperkaya donor sambil mengabaikan kebutuhan local.³⁴

e. Kontrol Finansial dan Administratif

³³ Mark Langan, Emerging Powers and Neo-Colonialism in Africa, Neo-Colonialism and the Poverty of "Development" in Africa, 2018.,6.

³⁴ Mark Langan, Emerging Powers and Neo-Colonialism in Africa, Neo-Colonialism and the Poverty of "Development" in Africa, 2018 ,203.

"Kendali atas kebijakan pemerintah dalam negara neokolonial dapat dijamin melalui pembiayaan biaya operasional negara, penempatan pejabat sipil pada posisi pengambil kebijakan, dan penguasaan moneter atas devisa".³⁵ Dalam hal ini kontrol finansial dan administratif melibatkan dominasi eksternal atas sistem keuangan dan birokrasi Afrika melalui institusi seperti Bank Dunia atau IMF, yang memaksakan kondisi untuk pinjaman atau bantuan. Ini mencakup pengawasan anggaran dan reformasi administratif yang mereduksi otonomi nasional, sehingga pemerintahan Afrika lebih akuntabel kepada donor daripada rakyatnya.

Hal ini terjadi karena ketergantungan Afrika pada utang dan bantuan pasca-kolonial, yang dimanfaatkan oleh donor untuk memaksakan agenda neoliberal. Alasan utamanya adalah untuk memastikan aliran sumber daya ke Utara dan mencegah kebijakan proteksionis Afrika. Cara pelaksanaannya melalui mekanisme seperti dukungan anggaran multi-donor (multi-donor budget support) yang disertai penilaian performa (performance assessment), serta audit eksternal yang mengikat.

Kontrol finansial dan administrative ini terjadi pada negara Ghana , yang mana kontrol donor atas anggaran Ghana melalui Multi-Donor Budget Support (MDBS), di mana donor Barat memengaruhi prioritas administratif dan keuangan, menyebabkan hilangnya ruang kebijakan.³⁶

f. Penetrasi Korporasi dan Institusi Asing

³⁵ Mark Langan, Emerging Powers and Neo-Colonialism in Africa, Neo-Colonialism and the Poverty of “Development” in Africa, 2018.,6.

³⁶ Mark Langan, Emerging Powers and Neo-Colonialism in Africa, Neo-Colonialism and the Poverty of “Development” in Africa, 2018, 95.

"Bantuan keuangan dari pemerintah asing dipandang sebagai alat untuk menjamin kepatuhan elit-elit Afrika tertentu sekaligus 'melicinkan' bentuk-bentuk penetrasi ekonomi korporasi yang merugikan penduduk Afrika".³⁷ Dalam hal ini digambarkan infiltrasi atau campur tangan ekonomi oleh perusahaan multinasional dan lembaga donor, yang menguasai sektor kunci seperti pertambangan dan pertanian. Ini menciptakan enclave ekonomi di mana keuntungan mengalir ke luar, sementara Afrika menanggung biaya sosial dan lingkungan.

Hal ini bisa terjadi dikarenakan karena globalisasi yang tidak seimbang, di mana korporasi asing memanfaatkan liberalisasi Afrika untuk ekstraksi sumber daya. Alasan utamanya adalah untuk mempertahankan akumulasi kapital global dengan biaya rendah, sehingga menghalangi pembangunan lokal. Cara terjadinya melalui investasi langsung asing (FDI), perjanjian perdagangan, dan lobi donor, yang memungkinkan korporasi mengendalikan aset nasional. Contohnya yaitu penetrasi korporasi asing di sektor minyak Ghana, di mana perusahaan seperti Tullow Oil bekerja sama dengan donor untuk mengamankan kontrak, mengakibatkan hilangnya kendali atas sumber daya.³⁸

Untuk mengoperasionalkan konsep neokolonialisme dalam studi kasus Rwanda Asylum Plan, dapat dilakukan dengan menelaah hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dalam kerja sama tersebut. Inggris, sebagai negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar, memindahkan tanggung jawab

³⁷ Mark Langan, Emerging Powers and Neo-Colonialism in Africa, Neo-Colonialism and the Poverty of "Development" in Africa, 2018.,6.

³⁸ Mark Langan, Emerging Powers and Neo-Colonialism in Africa, Neo-Colonialism and the Poverty of "Development" in Africa, 2018, 47-48.

pemrosesan pencari suaka ke Rwanda dengan imbalan dana kompensasi. Secara teoritis, Rwanda dianggap sebagai mitra kerja sama, namun secara empiris ia berada dalam posisi subordinat karena kebijakan tersebut lebih banyak mencerminkan kepentingan Inggris dalam mengendalikan migrasi dari pada kepentingan pembangunan Rwanda. Ini menunjukkan bahwa Rwanda menjadi alat eksternal bagi Inggris untuk mengelola masalah domestik dengan cara yang menurunkan makna kedaulatan Rwanda sendiri. Mekanisme seperti ini sesuai dengan apa yang disebut Nkrumah sebagai bentuk pengendalian kebijakan melalui "pembayaran terhadap biaya operasional negara", serta "kontrol moneter terhadap devisa melalui sistem perbankan yang dikuasai kekuatan imperialis".³⁹

Inggris dalam kerja sama ini tidak hanya bertindak sebagai mitra pembangunan, tetapi sebagai aktor neokolonial yang mengatur arsitektur kebijakan migrasi global dengan orientasi kepentingan domestiknya. Dengan memanfaatkan kekuatan finansial dan diplomatik, Inggris mampu menegosiasikan perjanjian yang lebih menguntungkannya dan membebani Rwanda dengan tanggung jawab yang secara moral dan administratif lebih berat. Pendisiplinan migrasi melalui Rwanda adalah bentuk eksternalisasi kebijakan yang secara substansial memperluas kuasa kolonial lama dalam bentuk baru. Seperti yang dicatat Nkrumah, "bantuan kepada negara neokolonial bukanlah hadiah, tetapi kredit berputar yang pada akhirnya kembali ke tangan negara donor dalam bentuk keuntungan ekonomi".⁴⁰

³⁹ Mark Langan, Emerging Powers and Neo-Colonialism in Africa, Neo-Colonialism and the Poverty of "Development" in Africa, 2018.,6.

⁴⁰ Mark Langan, Emerging Powers and Neo-Colonialism in Africa, Neo-Colonialism and the Poverty of "Development" in Africa, 2018.,6-7.

Elemen Kunci	Penjelasan	Aplikasi dalam Rwanda Asylum Plan
Kedaulatan Hampa (Nominal Sovereignty)	"Hakikat neokolonialisme adalah bahwa negara yang menjadi sasarnya, secara teori, bersifat merdeka dan memiliki segala simbol-simbol lahiriah kedaulatan internasional.	Rwanda tampak berdaulat secara formal sebagai mitra, tetapi kebijakan migrasinya dikendalikan oleh Inggris melalui perjanjian bilateral, mengurangi otonomi nyata Rwanda dalam pengelolaan pengungsi.
Pengaruh Eksternal terhadap Kebijakan Domestik	"Kebijakan tersebut lebih berorientasi pada kepentingan material unsur-unsur asing ketimbang kebutuhan warga setempat".	Kebijakan Rwanda Asylum Plan lebih memprioritaskan pengendalian migrasi Inggris daripada kebutuhan domestik Rwanda, seperti integrasi pengungsi yang berkelanjutan atau pembangunan lokal.
Kooptasi Elite Lokal	"Elit-elit Afrika yang terlibat dalam hubungan neokolonialisme akan memerintah atas nama pihak asing yang mendukung mereka, dan pada dasarnya 'mengesampingkan' kepentingan ekonomi rakyatnya sendiri".	Elite Rwanda, seperti pemerintahan Kagame, menerima dana dan legitimasi dari Inggris, meskipun hal itu dapat mengorbankan kepentingan nasional jangka panjang Rwanda.
Bantuan sebagai Kredit Berputar (Revolving Credit)	"Bantuan untuk negara neokolonial hanyalah kredit berputar: dibayarkan oleh penguasa neokolonial, mengalir melalui negara neokolonial, lalu kembali dalam bentuk laba yang bertambah".	Dana £120 juta dari Inggris ke Rwanda bukan bantuan murni, melainkan mekanisme yang memperkuat ketergantungan Rwanda sambil memberikan keuntungan politik bagi Inggris, seperti pengurangan beban migrasi.
Kontrol Finansial dan Administratif	"Kendali atas kebijakan pemerintah dalam negara neokolonial dapat diajukan melalui pembiayaan biaya operasional negara, penempatan pejabat sipil pada posisi pengambil kebijakan, dan penguasaan moneter atas devisa".	Inggris mengendalikan dana dan memantau implementasi administratif di Rwanda, termasuk verifikasi keamanan, sehingga memengaruhi operasional kebijakan migrasi Rwanda.
Penetrasi Korporasi dan Institusi Asing	"Bantuan keuangan dari pemerintah asing dipandang sebagai alat untuk menjamin kepatuhan elit-elit Afrika tertentu sekaligus 'melicinkan' bentuk-bentuk penetrasi ekonomi korporasi yang merugikan penduduk Afrika".	Institusi Inggris memengaruhi struktur migrasi Rwanda melalui perjanjian, membuka pintu bagi pengaruh korporasi asing di sektor terkait, seperti pengelolaan fasilitas pengungsi.

Tabel 1.1 Tabel Operasionalisasi Konsep Rwanda Asylum Plan dalam Perspektif Neokolonialisme

Sumber : table ini diolah dari buku Neo-Colonialism and the Poverty of

'Development' in Africa oleh Mark Langan tahun 2018

Melalui pemahaman konseptual yang telah dijelaskan, konsep neokolonialisme dapat dioperasionalisasikan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana neokolonialisme tidak hanya menjelaskan relasi kekuasaan secara

ekonomi dan politik, tetapi juga sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana kebijakan global dibentuk melalui logika dominasi dan pengaburan makna kedaulatan. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar lapisan-lapisan kekuasaan tersebut dan menunjukkan bahwa praktik neokolonialisme bukan sekadar wacana historis, melainkan realitas yang masih hidup dalam struktur kebijakan kontemporer.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian untuk memperoleh, menganalisis, dan menyajikan data untuk mengetahui bagaimana fenomena Hubungan Internasional tersebut diperoleh.⁴¹ Dalam penelitian ini data yang akan digunakan yaitu data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan resmi UNHCR, artikel ilmiah, serta literatur terkait migrasi internasional, dan neokolonialisme, dari akan dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analisis yang akan membantu penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berisikan sumber-sumber yang mendasar, berfokus kepada penjelasan atau bersifat deskriptif. Kumpulan data kualitatif dapat menjelaskan peristiwa suatu kejadian dan melihat kausalitas atau sebab akibat. Data-data tersebut jika dianalisis dengan baik maka akan menghasilkan temuan penelitian yang berkualitas dan konkret. Kemudian penelitian tersebut dapat digunakan lagi oleh peneliti selanjutnya hingga para pembuat kebijakan.⁴²

⁴¹ Mohtar Mas'oed, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi", (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994)

⁴² Matthew B. Miles and A. Michael and Johnny Saldaña Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3rd ed., vol. 3 (SAGE

Kemudian, berdasarkan kumpulan data-data tersebut penulis memutuskan untuk menyusun keseluruhan isi penelitian ini menggunakan jenis deskriptif analisis yang diperkuat dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan metode empiris yang menyelidiki suatu fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks dunia nyata, khususnya ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak tampak jelas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman holistik terhadap fenomena yang diteliti melalui eksplorasi mendalam terhadap kasus tertentu dengan menggabungkan berbagai sumber data yang relevan.⁴³ Pemilihan studi kasus dalam penelitian ini didasarkan pada relevansi Rwanda Asylum Plan sebagai fenomena unik dalam wacana politik migrasi global. Kasus kerja sama Inggris-Rwanda dipilih karena mencerminkan ketimpangan kekuasaan dan kepentingan antara negara Global North dan Global South, yang relevan dengan analisis neokolonialisme. Dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini berupaya menelaah secara rinci bagaimana kebijakan Rwanda Asylum Plan disusun, implementasinya, serta implikasinya terhadap relasi kekuasaan global.

Pelaksanaan studi kasus dilakukan melalui tahapan berikut: 1. Pemilihan Kasus: Menetapkan Rwanda Asylum Plan sebagai unit analisis karena sifatnya yang kontroversial dan representatif terhadap isu migrasi global, 2. Penentuan Batas Penelitian: Fokus analisis dibatasi pada aspek politik, ekonomi, dan relasi kuasa

Publications, Inc., 2015), [⁴³ Gilang Asri Nurahma dan Wiwin Hendriani, “Tinjauan Sistematis Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif,” *Mediapsi* 7, no. 2 \(2021\): 119–129, <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2021.007.02.4>.](http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.1010.</p></div><div data-bbox=)

dalam kerja sama Inggris-Rwanda, 3. Pengumpulan Data: Data diperoleh dari literatur akademik, dokumen perjanjian bilateral, laporan UNHCR, berita internasional, dan sumber resmi pemerintah, 4. Analisis Data: Data dikategorisasi berdasarkan tema utama (politik migrasi, neokolonialisme, dan kepentingan bilateral), kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola kekuasaan dan reproduksi kolonialisme dalam konteks migrasi.⁴⁴

1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, batasan penelitian diperlukan untuk lebih memahami dan mendalami objek yang diteliti. Adapun batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah batasan yang berkaitan dengan masalah yaitu Bagaimana praktik neo kolonialisme dalam kebijakan Rwanda Asylum Plan antara Inggris dan Rwanda Selain itu juga terdapat batasan waktu yang diambil dalam kurun waktu tahun 2022-2024 yang didasarkan penandatangani kerja sama oleh Inggris dan Rwanda pada bulan April 2022 dan pengumuman pembatalan kerja sama Rwanda Asylum Plan oleh Inggris pada bulan Juli 2024.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis dan unit eksplanasi sangat penting untuk dijabarkan dalam suatu penelitian. Unit analisis atau variabel dependen adalah objek kajian yang aktivitas dan perilakunya ingin kita jelaskan, deskripsikan dan ramalkan dalam penelitian. Unit eksplanasi atau variabel independen adalah objek yang memengaruhi objek yang akan diteliti sehingga dapat menjelaskan dan meramalkan hal

⁴⁴ Gilang Asri Nurahma dan Wiwin Hendriani, “Tinjauan Sistematis Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif,” Mediapsi 7, no. 2 (2021): 119–129, <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2021.007.02.4>.

tersebut.⁴⁵ Pada penelitian ini unit analisis yang akan digunakan adalah Rwanda Asylum Plan, yaitu kebijakan bilateral antara Inggris dan Rwanda yang bertujuan untuk merelokasi pencari suaka dari Inggris ke Rwanda., sedangkan unit eksplanasinya adalah praktik neokolonialisme yang tercermin melalui mekanisme ekonomi, politik, dan hukum dalam relasi kuasa yang asimetris antara Global North dan Global South.

Tingkat analisis adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena dalam Hubungan Internasional dengan memisahkan kompleksitas isu, aktor, dan tema ke dalam tingkatan yang berbeda, tingkat analisis membantu menyusun analisis agar tidak kewalahan oleh banyaknya variabel dalam hubungan internasional terdapat 4 tingkatan analisis dalam hubungan internasional yaitu:

1. Individu: melihat perilaku dan keputusan orang-orang baik dalam peran pemerintahan maupun non-pemerintahan, mengkaji keyakinan, ketakutan, serta kepribadian mereka.
2. Negara: melihat negara-bangsa sebagai pelaku dalam serangkaian kondisi eksternal tertentu, dan sebagai pelaku dengan karakteristik internal tertentu (seperti apakah mereka demokrasi atau apakah mereka besar atau kecil), serta mempertimbangkan posisi strategis dan ekonomi mereka.
3. Kelompok: melihat para pelaku dalam konteks sosial, organisasi, profesi, dan birokrasi mereka, serta menunjuk pada cara mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Contohnya adalah para pengambil

⁴⁵ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), 39-40

keputusan politik dalam struktur pemerintahan seperti partai politik, organisasi non-pemerintah, dan kelompok kepentingan yang beroperasi di persimpangan antara pemerintah dan masyarakat.

4. system internasional: mencakup keseluruhan sistem global dan melihat persoalan seperti distribusi kekuasaan politik, sistem ekonomi, tata kelola global (organisasi internasional, hukum, dan norma), serta penyebaran teknologi. Yang penting, tingkat ini juga mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor ini menciptakan kondisi yang memaksakan diri secara struktural pada tingkat-tingkat lainnya.⁴⁶ Dalam penelitian ini tingkatan analisis yang digunakan adalah tingkat sistem internasional, yang berfokus pada struktur, norma, dan dinamika kekuasaan dalam sistem global yang membentuk dan memengaruhi kerja sama Rwanda Asylum Plan antara Inggris dan Rwanda.

Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam tentang bagaimana kebijakan ini mencerminkan dan mereproduksi ketimpangan struktural dalam tata kelola migrasi global, yang ditandai oleh dominasi negara-negara Global North atas Global South melalui mekanisme ekonomi, politik, dan hukum. Rwanda Asylum Plan dipandang sebagai bagian dari pola yang lebih luas dalam sistem internasional, di mana negara-negara maju menggunakan kebijakan eksternalisasi migrasi untuk mengalihkan tanggung jawab kemanusiaan kepada negara-negara berkembang, memperkuat relasi kuasa neokolonial yang tertanam dalam arsitektur global.

⁴⁶ Amrita Chaudhary, "Level of Analysis in International Relations," *International Journal of Science and Research (IJSR)* 11, no. 12 (2022): 268–269.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi pustaka atau library research. Teknik ini memanfaatkan sumber-sumber data sekunder seperti artikel jurnal, dokumen resmi, berita, pernyataan resmi dan buku perti publikasi dan laporan dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), dokumen hukum seperti *Safety of Rwanda Bill*, serta pernyataan dan laporan kebijakan dari pemerintah Inggris dan Rwanda.

Selain itu, data diperoleh dari jurnal ilmiah internasional yang membahas isu eksternalisasi migrasi, hubungan Global North dan Global South, serta pendekatan postkolonial dalam studi hubungan internasional. Buku-buku akademik yang membahas teori neo colonialism dan hubungan internasional kritis juga menjadi sumber utama dalam menganalisis kerangka konseptual penelitian ini. Tidak hanya itu, artikel dari media massa internasional yang kredibel turut dijadikan referensi untuk memperoleh data empiris dan perkembangan aktual dari implementasi Rwanda Asylum Plan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dimensi kekuasaan dan ketimpangan dalam kerja sama Inggris-Rwanda..

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif oleh Lexy J. Moloeng yang menekankan pada makna dan pemahaman subjek penelitian yang dilakukan secara berulang untuk memastikan keakuratan data yang mendalam. Metode ini digunakan untuk menjelaskan fenomena, perilaku, persepsi, motivasi serta tindakan dari subjek yang diteliti.

Terdapat tiga rangkaian kegiatan dalam metode ini, yaitu berupa reduksi data, kategorisasi data dan penafsiran data.⁴⁷

Dalam proses reduksi data, peneliti mengumpulkan berbagai data yang telah diperoleh dari studi pustaka yang kemudian dipelajari, ditelaah dan kemudian direduksi menggunakan teknik abstraksi. Abstraksi merupakan langkah untuk merangkum poin-poin penting dari data yang telah terkumpul sehingga dapat diuraikan dengan lebih baik. Selanjutnya peneliti melakukan kategorisasi dengan memasukkan data-data yang telah diperoleh dan direduksi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kategori yang sesuai dengan konsep yang digunakan.

Peneliti kemudian mengklasifikasikan praktik neo kolonialisme dalam kebijakan Rwanda Asylum Plan antara Inggris dan Rwanda berdasarkan konsep Neo Colonialism yang dijelaskan oleh Kwame Nkrumah. Hal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi Bagaimana praktik neo kolonialisme dalam kebijakan Rwanda Asylum Plan antara Inggris dan Rwanda. Kemudian peneliti melakukan penafsiran data dengan menghubungkan serta mengembangkan kategori-kategori yang telah dikumpulkan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang selanjutnya dijabarkan terkait Bagaimana praktik neo kolonialisme dalam kebijakan Rwanda Asylum Plan antara Inggris dan Rwanda.

⁴⁷ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif [Edisi Revisi]*, 34th ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).

1.9 Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan membahas latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II: DINAMIKA PENGATURAN MIGRASI GLOBAL DALAM KONTEKS RELASI INGGRIS - RWANDA

Bab ini menguraikan dinamika pengaturan migrasi global dengan fokus pada konteks kerja sama Rwanda Asylum Plan. Pembahasan mencakup: Dinamika migrasi di Inggris pasca-Brexit sebagai latar belakang kebijakan Rwanda Asylum Plan, isi dan mekanisme perjanjian Rwanda Asylum Plan, posisi Rwanda dalam kerja sama tersebut, termasuk faktor politik, ekonomi, dan sosial yang memengaruhinya, serta respons komunitas internasional terhadap kebijakan ini, termasuk kritik dan dukungan dari aktor global seperti PBB, LSM, dan negara lain.

BAB III: STRUKTUR DAN DINAMIKA DALAM RWANDA ASYLUM PLAN

Bab ini menjelaskan menguraikan struktur, dinamika, dan konteks kebijakan ini secara mendalam yang mencakup latar belakang pembentukan Rwanda Asylum Plan, struktur dan mekanisme operasionalisasi kebijakan Rwanda Asylum Plan, faktor-faktor domestik dan internasional yang memengaruhi pelaksanaan Rwanda Asylum Plan, seperti tantangan hukum, dinamika politik domestik Inggris, dan kapasitas Rwanda sebagai negara penerima, dan Implikasi awal kebijakan ini terhadap pencari suaka dan hubungan bilateral Inggris-Rwanda.

BAB IV: REPRODUKSI NEOKOLONIALISME DALAM KERJA SAMA RWANDA ASYLUM PLAN

Bab ini menganalisis kerja sama Rwanda Asylum Plan antara Inggris dan Rwanda dengan menggunakan teori neokolonialisme sebagai alat analisis. Pembahasan mencakup: penerapan konsep neokolonialisme untuk mengidentifikasi dinamika hubungan kekuasaan antara Inggris dan Rwanda, bagaimana kebijakan ini mereproduksi struktur neokolonial melalui mekanisme migrasi dan ketergantungan ekonomi, serta implikasi kerja sama ini terhadap hubungan internasional kontemporer, termasuk dampaknya pada kedaulatan Rwanda dan persepsi global terhadap Inggris.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini peneliti akan ditarik kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam bab sebelumnya dan juga peneliti menyertakan saran penulis atas penelitian ini untuk peneliti selanjutnya.

